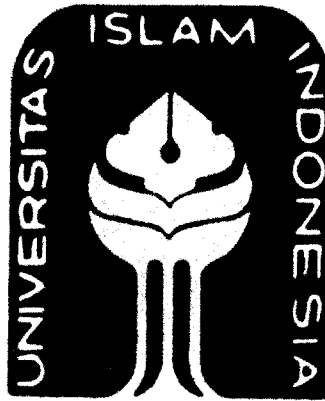


**HUBUNGAN *CORPORATE GOVERNANCE* DAN
PENGUNGKAPAN INFORMASI PADA PERUSAHAAN
PUBLIK DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Oleh

Nama : Aulia Khusnun Nisa

No. Mahasiswa : 00 312 429

Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

**HUBUNGAN *CORPORATE GOVERNANCE* DAN
PENGUNGKAPAN INFORMASI PADA PERUSAHAAN
PUBLIK DI INDONESIA**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Aulia Khusnun Nisa
No. Mahasiswa : 00312429

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi in tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman / sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 18 April 2005

Penyusun,

(Aulia Khusnun Nisa)

**HUBUNGAN *CORPORATE GOVERNANCE* DAN
PENGUNGKAPAN INFORMASI PADA PERUSAHAAN
PUBLIK DI INDONESIA**

Hasil Penelitian

diajukan oleh

Nama : Aulia Khusnun Nisa

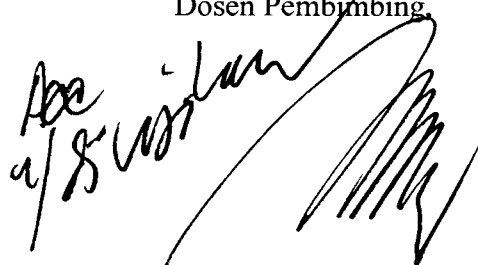
Nomor Mahasiswa : 00 312 429

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achmad Sobirin', written over a large, stylized scribble or signature.

(Dr. Achmad Sobirin, MBA, Ak)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

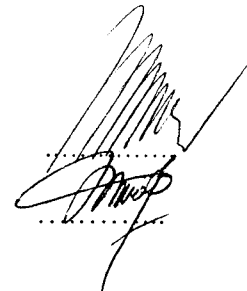
HUBUNGAN CORPORATE GOVERNANCE DENGAN PENGUNGKAPAN
INFORMASI PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA

Disusun Oleh: **AULIA KHUSNUNNISA**
Nomor mahasiswa: 00312429

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 18 April 2005


Pembimbing Skripsi/Penguji : Dr. Achmad Sobirin, MBA, Ak

Penguji : Dra. Neni Meidawati, M.Si, Ak



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia




Drs. Suwarsono, MA

MOTTO

"Sangat beruntunglah bagi orang-orang yang mampu memanfaatkan peluangnya menjadi sebuah masalah menjadi dua masalah. Jika masalah tersebut adalah keajaiban yang tidak terduga. Orang-orang yang begitu mampu yang menggunakan waktu dengan optimal. Dan sudah tentu dengan demikian ia melakukan sesuatu yang tidak dimisalkan oleh orang-orang lain."

(Abusy Syaikh, 1986)

"Pelajarilah ilmu.

Barangsiapa mempelajarinya karena Allah, itu taqwa.

Menuntutnya, itu ibadah.

Mengulang-ulangnya, itu tasbik.

Membahasnya itu jihad.

Mengajarkannya orang yang tidak takut, itu sedekah.

Memberikan kepada ahlinya,

itu mendekatkan diri kepada Tuhan."

(Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Ibu Abdil Barr)

(Ihya Al-‘Ulum, 1986)



"Barangsiapa yang membaca Al-Quran dengan penuh perhatian dan kepedulian, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam surga-Nya."

(Asy Syarh: 5-8)

B

"Barangsiapa yang membaca Al-Quran dengan penuh perhatian dan kepedulian, maka Allah akan memaafkan dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam surga-Nya."

(HR. Muslim)

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI

UNTUK ...

Satu-satunya jalan kebenaran, "ALLAH SWT" dan RASULNYA

Serta kepada orang-orang yang aku kasihi :

1. **MY SUPERMOM,**

tercinta, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, nasehat, kesabaran, perhatian dan motivasi yang tiada henti. Lia sayang mama

Maaf ma Lia lulusnya telat. Lia berusaha buat mama bangga dan kelak mama bisa tersenyum melihat Lia menjadi seperti yang mama inginkan.

2. **Alm Papa,** , Kenangan bersama Papa
ga akan Lia lupain. Doa Lia senantiasa menyertai
Papa.

I MISS U.

3. **MAS IPUL & MBA' DEWI, JUGA MAS YUZ. THANX BRO...**

4. **semua Keluarga Banyuwangi dan Ambarawa.**

5. **Alm. Hendrawan Feriyas.** Ternyata Allah SWT berkehendak lain, terimakasih telah memberi warna dalam hidupku. Selamat jalan kasih...

6. **MAS NAJRUL AFRIANTO** (*sosok yang mengisi*

kehampaan kalbuku) Lia salut dengan Kesabaranmu! Trimakasih

atas Kasih yang tiada henti.. Stay love me yach! Just Keep on Fighting coz Hidup adalah perjuangan... 'n menjadi dewasa itu adalah pilihan...

7. My lovely friends, Risda, Tuti n Velin. Sukses ya! Tunggu aku di Pekanbaru...
8. My true friend. Udur (Kangen banget nih). Rini di Malang (u know me lah... n you have to stay alert with Nanang ya!). Bram di Malang (jangan bosen dengerin aku curhat ya). Alibaba (tempatku menangis) you're the best guys! Dhoy (thanx bro'... sori sering ngrepotin). Rendra,, Dedy n Yyun di Jkt (trimakasih atas persahabatan yang indah). Sahabat... kalian termanis dalam kisahku...
9. Bpk Ibu Abdul Bari n All Vidagariners (esp. Mba Fitri, Jeng Aniek, Jeng Ratih, ~~Yay~~, Zakya n ~~Yay~~, makasih atas persahabatannya, Kalian Gilaaaaaa☺).
10. ~~Yay~~ teman suka n duka selama di Jogja yang Benhati Nyaman.
11. Serta untuk semua yang telah datang dan pergi...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas ridho – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “**Hubungan Corporate Governance Dan Pengungkapan Informasi Pada Perusahaan Publik di Indonesia**”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Drs. Suwarsono Muhammad, MA., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Erna Hidayah, M.Si., Ak., Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Achmad Sobirin, MBA, Ak sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat penting dalam penyusunan skripsi ini.
4. Mama yang telah memberikan dorongan moril dan material, harapan, semangat serta doa.
5. Kakak-kakak tercinta, Mas Yuz, Mas Ipul & Mbak Dewi yang telah memberikan semangat dan doa.

6. Mas Nasrul yang rela menyisihkan sebagian waktunya dan siap membantu apapun dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan dukungan dan semangat.
7. Tuti, Velin, dan Risda yang selama ini telah menjadi tempat curhat & sharing.
8. Bapak dan Ibu Kost serta teman – teman kost Vidagarin, yang selalu jadi tempat berkeluh kesah.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna bagi pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, April 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Berita Acara Ujian	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Laporan Keuangan	10
2.2 Komponen Laporan Keuangan.....	11
2.3 Tujuan Laporan Keuangan.....	13
2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	13
2.5 Pihak-pihak yang memerlukan Laporan Keuangan	15
2.6 Luas Pengungkapan.....	15
2.7 Pengertian <i>Corporate Governance</i>	17
2.8 Prinsip-prinsip <i>Corporate Governance</i>	18

2.9	Manfaat <i>Corporate Governance</i> bagi perusahaan.....	21
2.10	Peranan Dewan Komisaris.....	23
2.11	Peranan Komite Audit.....	24
2.12	Peranan Direksi.....	25
2.13	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	26
2.13.1	Hubungan <i>Corporate Governance</i> dan Pengungkapan Informasi : Pengujian Secara Simultan.....	26
2.13.2	Analisis Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan.....	28
2.14	Hipotesis Penelitian.....	30
BAB III	METODE PENELITIAN	34
3.1	Data Penelitian	34
3.2	Spesifikasi Populasi	35
3.3	Spesifikasi Variabel	35
3.4	Analisis dan Pengolahan Data	38
3.5	Pengujian Hipotesis.....	41
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	43
4.1	Statistik Deskriptif	43
4.1.1	<i>Corporate Governance Perception Index</i>	43
4.1.2	Data Statistik Deskriptif	45
4.2	Korelasi	46
4.2.1	Hubungan CGPI dan Indeks Pengungkapan	57
4.3	Analisis Regresi menggunakan <i>Two Stage Least Square</i>	49
4.3.1	Indeks Pengungkapan Wajib	49
4.3.1.1	Analisis Persamaan I	49
4.3.1.2	Analisis Persamaan II	51
4.3.2	Indeks Pengungkapan Sukarela	52

4.3.2.1 Analisis Persamaan I	52
4.3.2.2 Analisis Persamaan II	54
4.4 Diskusi Hasil dan Implikasi Manajerial	55
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran dan Implikasi.....	62
5.3 Keterbatasan Penelitian	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
4.1 Daftar emiten berdasarkan survey IICG tahun 2001	43
4.2 Daftar emiten berdasarkan survey IICG tahun 2002	44
4.3 Daftar emiten berdasarkan survey IICG tahun 2003.....	44
4.4 Statistik Deskriptif.....	45
4.5 Hasil Pengujian Korelasi antar Variabel	46
4.6 Uji Simultanitas	50
4.7 Pengujian Simultan Indeks <i>Corporate Governance</i> dengan Indeks Wajib	50
4.8 Pengujian Simultan Indeks <i>Corporate Governance</i> dengan Indeks Wajib	51
4.9 Uji Simultanitas	53
4.10 Pengujian Simultan Indeks <i>Corporate Governance</i> dengan Indeks Wajib	53
4.11 Pengujian Simultan Indeks <i>Corporate Governance</i> dengan Indeks Wajib	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Statistik Deskriptif	66
2. Korelasi	67
3. Two-stage Least Square CGPI – Indeks Wajib.....	68
4. Regression Uji Hausman CGPI – Indeks Wajib.....	69
5. Two-stage Least Square Indeks Wajib – CGPI.....	70
6. Regression Uji Hausman Indeks Wajib – CGPI.....	71
7. Regression CGPI – Indeks Wajib	72
8. Regression Indeks Wajib	73
9. Two-stage Least Square CGPI – Indeks Sukarela.....	74
10. Regression Uji Hausman CGPI – Indeks Sukarela.....	75
11. Two-stage Least Square Indeks Sukarela – CGPI.....	76
12. Regression Uji Hausman Indeks Sukarela – CGPI.....	77
13. Regression CGPI – Indeks Sukarela	78
14. Regression Indeks Sukarela.....	79

ABSTRAK

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu (*past performance*) serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen, baik kepada pemilik maupun otoritas moneter serta instansi-instansi lainnya yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan.

Corporate Governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk *stake holders*. Pelaksanaan *good corporate governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. *Corporate Governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik, untuk meningkatkan nilai perusahaan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Berdasarkan teori yang ada, semakin tinggi indeks implementasi *Corporate Governance*, maka semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang memberikan pengungkapan yang tinggi dalam laporan tahunan akan menunjukkan bahwa implementasi *Corporate Governance* pada perusahaan tersebut semakin baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu (*past performance*) serta berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen, baik kepada pemilik maupun otoritas moneter serta instansi-instansi lainnya yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, dimana akuntansi merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan dan penyajian atau pelaporan dan penginterpretasian transaksi keuangan suatu perusahaan secara sistematis (Munawir, 1999 : 4). Definisi Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002 : 2), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Kondisi makro perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran serta dunia usaha. Pada pertengahan tahun 1997-1998 krisis yang dialami bangsa

Indonesia mengakibatkan kinerja dunia usaha menurun, selanjutnya berdampak pada perekonomian nasional. Kelemahan mendasar pada perekonomian di Indonesia terutama ditingkat mikro, diakibatkan pengelolaan ekonomi dan sektor usaha yang kurang efisien serta sistem perbankan yang rapuh. Pemerintah melalui Bapepam telah mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi, meningkatkan efisiensi perekonomian baik secara makro maupun mikro, serta mendorong terciptanya penerapan pengelolaan dunia usaha yang baik (*Good Corporate Governance*). Dalam hal ini, dihubungkan antara penerapan *Good Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan publik.

Definisi dari *Corporate Governance* atau Tata Kelola Korporasi menurut *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG, 2000) yaitu suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. Berdasarkan definisi tersebut nampak jelas bahwa *Corporate Governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik, untuk meningkatkan nilai perusahaan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Manajemen sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik atau prinsipal, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Dilain pihak prinsipal sebagai pemberi amanah akan

memberikan insentif kepada manajemen berupa berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non finansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh prinsipal untuk memberikan insentif pada manajemen. Hal lain yang membuat permasalahan adalah persepsi kedua belah pihak dalam menanggung resiko (Khomsiyah, 2003). Manajemen yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan seluruh informasi atas kepemilikannya sedangkan prinsipal menginginkan penyajian informasi yang selengkapnyanya. Manajemen sulit untuk memenuhi keinginan prinsipal karena adanya beberapa faktor seperti : biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari resiko untuk terlihat kelemahannya, dan waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi. Oleh karena itu *Corporate Governance* merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk *stake holders*. Pelaksanaan *good corporate governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *Corporate Governance* menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat.

Menurut Herwidayatmo (2000), mengutip penelitian yang dilakukan ADB tahun 1999, Indonesia berada pada urutan yang sangat rendah dalam persepsian standar akuntabilitas, proses penentuan dewan, auditing dan ketaatannya, pengungkapan informasi dan transparansi. Hal itu disebabkan karena tidak

diterapkannya *Good Corporate Governance*, yaitu struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, mekanisme pengawasan oleh Dewan Komisaris yang tidak berfungsi secara efektif, tidak adanya kontrol pasar terhadap perusahaan, dominasi pendanaan eksternal yang berasal dari pinjaman bank, dan lemahnya pengawasan.

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang telah dikembangkan oleh OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) yaitu Keadilan (*Fairness*), Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Transparansi. Prinsip Keadilan yaitu perlindungan kepentingan minoritas pemegang saham dari kecurangan, perdagangan dan penyalahgunaan oleh orang dalam (*self dealing* atau *insider trading*). Prinsip Akuntabilitas yaitu penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara dewan komisaris, manajemen, pemegang saham, dan auditor. Prinsip Responsibilitas yaitu, pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada untuk mengungkapkan informasinya. Sedangkan Prinsip Transparansi yaitu, perusahaan harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Pengungkapan tersebut harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan diaudit oleh auditor eksternal yang independen.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Berdasarkan teori yang ada, semakin tinggi

indeks implementasi *Corporate Governance*, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang memberikan pengungkapan yang tinggi dalam laporan tahunan akan menunjukkan bahwa implementasi *Corporate Governance* pada perusahaan tersebut semakin baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks *Corporate Governance* mempunyai hubungan positif dengan indeks pengungkapan. Menurut Khomsiyah (2003) hal ini sesuai dengan keinginan regulator (Bapepam), yang mendorong diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang akan meningkatkan perlindungan bagi pihak investor dengan adanya informasi yang diberikan oleh perusahaan.

Sesuai dengan uraian diatas, penelitian ini akan mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan memperluas pengungkapan informasinya yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib adalah informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang berlaku. Perusahaan memiliki keleluasaan dalam melakukan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunannya sehingga menimbulkan adanya keragaman atau variasi luas ungkapan sukarela antar perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi Pada Perusahaan Publik Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang dan judul penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

- Apakah *Corporate Governance* mempunyai hubungan dengan pengungkapan informasi, baik wajib maupun sukarela dalam laporan tahunan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Penerapan *Corporate Governance* terbatas pada perusahaan-perusahaan yang besar dan mempunyai tingkat regulasi yang tinggi. Asumsinya, penerapan *Corporate Governance* memerlukan biaya yang besar, maka perusahaan-perusahaan besar akan lebih mampu untuk menerapkannya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat regulasi yang tinggi (misal, perbankan) akan cenderung untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dengan lebih baik.
2. Yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan bersedia disurvei oleh IICG pada tahun 2001, 2002 dan 2003.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *Corporate Governance* mempunyai hubungan dengan Pengungkapan Informasi, baik pengungkapan wajib maupun sukarela dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hubungan antara penerapan *Good Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

2. Bagi Investor

Membantu memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan dengan melihat penerapan *Good Corporate Governance* sehingga dapat mengambil keputusan investasi dengan tepat.

3. Bagi Perusahaan

Membantu memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dalam hal ini penerapan *Good Corporate Governance*, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan di masa mendatang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menerangkan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dikemukakan. Bab ini membahas pengertian laporan keuangan, komponen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, luas pengungkapan, pengertian *Corporate Governance*, prinsip-prinsip *Corporate Governance*, manfaat *Corporate Governance* bagi perusahaan, peranan dewan komisaris, peranan komite audit, peranan direksi, tinjauan penelitian terdahulu serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menerangkan mengenai data-data yang diperlukan yang meliputi data penelitian, spesifikasi populasi dan sampel, spesifikasi variabel, pengolahan data, hasil analisis, dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini mengemukakan hasil analisis data yang telah dilakukan, berupa perhitungan dan hasil akhir yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada suatu periode akan tercermin dalam laporan-laporan keuangan perusahaan yang pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan-kegiatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan, sehingga akuntansi sangat erat kaitannya dengan laporan keuangan. Akuntansi merupakan rangkaian proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan dan penyajian atau pelaporan dan penginterpretasian transaksi keuangan suatu perusahaan secara sistematis (Munawir, 1999 : 4). Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002 : 2), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Dalam hal ini dihubungkan antara penerapan *Corporate Governance* oleh suatu perusahaan dengan teori-teori dalam pengungkapan laporan keuangan untuk mengetahui sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur sesuai dengan prinsip-prinsip *Corporate Governance*.

2.2 Komponen Laporan Keuangan

Pengungkapan meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Pengungkapan tersebut harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan diaudit oleh auditor eksternal yang independen sebagai bentuk penerapan *Corporate Governance*. Perusahaan secara periodik harus menyusun laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak intern dan pihak ekstern. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

1. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca atau sering disebut juga laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.

2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu dan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan

berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*)

Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Arus kas diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari kegiatan investasi, kegiatan pembelanjaan, dan kegiatan usaha.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan (SAK, 2002 : 17-18) :

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen (SAK, 2002 : 18).

2.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut SAK (2002 : 4) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Hal ini sejalan dengan tujuan penerapan *Corporate Governance* yaitu menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.

2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu (SAK, 2002 : 7) :

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa

informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat Dibandingkan

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam

perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

2.5 Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan yaitu manajer, investor, kreditor, karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Perusahaan yang menerapkan *Corporate Governance* menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil.

2.6 Luas Pengungkapan

Keluasan pengungkapan adalah salah satu bentuk kualitas pengungkapan. Menurut Na'im dan Rahman (2000), kualitas tampak sebagai atribut-atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi. Meskipun kualitas akuntansi masih memiliki makna ganda (*ambiguous*), banyak penelitian yang menggunakan *Index of Disclosure Methodology* mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan tahunan. Dengan kata lain bahwa tingginya kualitas informasi akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan pengungkapan.

Ada tiga konsep mengenai luas pengungkapan Laporan Keuangan (Na'im dan Rahman, 2000). Konsep itu adalah *adequate*, *fair*, dan *full disclosure*. Konsep yang paling sering dipraktekkan adalah pengungkapan yang cukup (*adequate disclosure*), yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana pada tingkat pengungkapan ini investor dapat menginterpretasikan angka-angka dalam Laporan Keuangan dengan benar. Pengungkapan yang fair (*fair disclosure*) mengandung sasaran etis dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca (investor) potensial. Pengungkapan penuh (*full disclosure*) merupakan pengungkapan atas semua informasi yang relevan.

Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah, sehingga beberapa pihak justru berpendapat tidak baik. Informasi yang terlalu melimpah akan mengungkapkan detail-detail yang tidak begitu penting justru akan menutup informasi yang signifikan dan menyebabkan Laporan Keuangan sulit untuk diinterpretasikan. Dampak negatif lain dari pengungkapan yang meluas adalah pada kompetisi yang dinamis dalam pasar produk. Tersebarnya informasi penting (*proprietary information*) dalam hal strategi dan rencana perusahaan dapat merugikan posisi kompetitif perusahaan sendiri.

Ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar (Hendriksen dan Breda, 2000). Yang pertama adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Kedua adalah pengungkapan

sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

2.7 Pengertian *Corporate Governance*

Definisi dari *Corporate Governance* atau Tata Kelola Korporasi menurut *The Indonesian Institute For Corporate Governance* (IICG, 2000) yaitu suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. Berdasarkan definisi tersebut nampak jelas bahwa *Corporate Governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik, untuk meningkatkan nilai perusahaan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Data hasil riset dari *The Indonesian Institute for Corporate Governance* yang berupa *Corporate Governance Perception Index*, mengukur implementasi *Corporate Governance* pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Dari indeks tersebut rating atau pemeringkatan disusun. Alasan penggunaan indeks ini disebabkan oleh keterbatasan data tentang penelitian penerapan *Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Indeks tersebut merupakan satu-satunya indeks yang dipublikasikan dari hasil penelitian pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.8 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Dalam praktek *good corporate governance* dikenal adanya 4 prinsip utama yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan perusahaan. Keempat prinsip tersebut adalah keadilan (*fairness*), akuntabilitas, pertanggungjawaban (*responsibility*), dan transparansi.

1. Keadilan (*fairness*)

Keadilan yaitu perlindungan kepentingan minoritas pemegang saham dari kecurangan, perdagangan, dan penyalahgunaan oleh orang dalam (*self dealing* atau *insider trading*). Prinsip *fairness* menyiratkan adanya perlakuan yang sama (*equal*) terhadap para pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas. Dalam prakteknya prinsip ini sering dilanggar, terutama dalam kasus-kasus *takeovers* (pengambilalihan perusahaan). Kasus yang sering terjadi adalah keberpihakan manajemen terhadap sekelompok pemegang saham, biasanya pemegang saham mayoritas. Hal ini bisa terjadi dengan mudah karena baik dewan komisaris dan dewan direksi didominasi oleh para pemegang saham tersebut atau keluarganya. Suatu perusahaan publik yang beritikad baik seharusnya tetap menjaga agar dewan komisaris dan dewan direksinya tetap bekerja secara independen dan profesional. Selain itu prinsip ini juga mensyaratkan manajemen untuk sebisa mungkin menghindari situasi yang mengandung *conflict of interest*, misalnya dalam kasus *management buyouts* (perusahaan yang dibeli oleh manajemennya sendiri). Persyaratan ini

penting karena seorang manajer yang melakukan transaksi semacam itu sama dengan pemain bola yang bermain di dua lapangan sekaligus. Kepentingan pemegang saham yang seharusnya dilindunginya akan diletakkan di bawah kepentingan pribadinya.

2. Akuntabilitas

Prinsip dasar Akuntabilitas yaitu menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara dewan komisaris, manajemen, pemegang saham, dan auditor yang meliputi *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya (Baridwan, 2002). Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya Dewan Direksi, Komisarissaris Independen, dan Komite Audit.

3. Responsibilitas

Prinsip Responsibilitas yaitu, tanggungjawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada untuk mengungkapkan informasinya untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Tjager dkk (2003:52) menyebutkan bahwa prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya

tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika, dan memelihara bisnis yang sehat.

Selama ini paradigma manajer dalam perusahaan selalu dibatasi oleh motif mengejar laba semata (*single bottom line*). Hal ini membuat mereka lupa bahwa perusahaan sebagai bagian dari suatu komunitas juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Bermula dari pemikiran ini, *corporate governance* mengangkat issue pertanggungjawaban tersebut sebagai salah satu tujuan yang harus diperhitungkan oleh perusahaan dalam operasinya. Dengan perubahan tersebut perusahaan harus mulai menerapkan prinsip *triple bottom line* dalam bisnisnya, yaitu mengejar laba, memenuhi tanggung jawab sosial, dan menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan.

4. Transparansi

Prinsip Transparansi yaitu perusahaan harus menjamin adanya tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders* serta pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.

Prinsip transparansi harus diterapkan dalam setiap aspek di perusahaan yang bersangkutan dengan kepentingan publik ataupun pemegang saham. Transparansi bisa dimulai dengan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, sistem penggajian eksekutif dan

komisaris di perusahaan, sampai dengan informasi-informasi lain yang relevan di pasar modal. Issue mengenai penggajian komisaris dan eksekutif adalah berita paling aktual yang sering dibahas oleh kalangan praktisi maupun akademisi *corporate governance*. Hal ini merebak ketika para pengamat menemukan fakta bahwa kebanyakan manajer dan komisaris tetap kaya padahal perusahaan yang mereka pimpin dijera oleh hutang yang besar, sedangkan kenikmatan yang diterima oleh manajer itu berasal dari pemegang saham. Sehingga perlu dibentuk komite kompensasi dalam dewan komisaris, yang bertugas menilai kinerja anggota dewan dan meninjau kelayakan gaji yang diterimanya dari perusahaan.

2.9 Manfaat *Corporate Governance* bagi perusahaan

Ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh perusahaan dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* :

a. Meminimalkan *agency cost*

Selama ini pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian kewenangan kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Biaya-biaya inilah yang disebut dengan *agency*

cost. Dengan penyusunan struktur dan pembagian fungsi yang baik, biaya ini bisa ditekan serendah mungkin.

b. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang dikelola dengan baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi kreditor. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman. Hal tersebut selain dapat memperkuat kinerja keuangan, juga akan membuat produk perusahaan yang dilepas ke pasaran menjadi lebih kompetitif.

c. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Sebuah perusahaan yang dikelola dengan baik akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham. Hal ini akan terlihat terutama ketika seorang investor bermaksud melakukan investasi untuk jangka waktu yang lama.

d. Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Karena perusahaan sangat mengandalkan kepercayaan dari *stakeholders* atas informasi yang diungkapkannya. Sehingga *stakeholders* mendesak keras agar perusahaan menerapkan konsep pengelolaan yang baik, karena bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun mendatang perusahaan yang tidak menerapkan *good corporate governance* akan kalah

dalam persaingan karena dianggap tidak melindungi kepentingan *stakeholdernya*.

2.10 Peranan Dewan Komisaris

Peranan dewan komisaris yaitu sebagai organ yang menjalankan fungsi supervisi, bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi serta memberikan saran-saran kepada direksi jika diperlukan. Sedangkan korporasi memiliki sistem yang dijadikan landasan untuk rekrutmen dan seleksi, pemantauan kinerja dan balas jasa. Komposisi komisaris independen terhadap jumlah seluruh dewan komisaris adalah sekurang-kurangnya 20% dari anggota dewan komisaris haruslah merupakan orang luar untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi musyawarah yang dilakukan dewan komisaris. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris tidak boleh mengambil keuntungan pribadi, Dewan Komisaris harus mempunyai akses terhadap informasi mengenai perseroan secara menyeluruh dan pada waktunya. Pengangkatan dan penetapan gaji Komisaris maupun Direksi harus ditetapkan dalam suatu sistem yang resmi dan transparan. Karakteristik peranan Dewan Komisaris dalam implementasi *Good Corporate Governance* sesuai riset yang dilakukan IICG adalah :

- a. Komisaris Independen secara aktif melaksanakan fungsi dan tugas seperti menyampaikan peristiwa yang dianggap penting bagi korporasi, memberikan rekomendasi, saran dan perbaikan terhadap suatu masalah dan lainnya.

- b. Dewan Komisaris bersungguh-sungguh memiliki tanggung jawab pribadi dalam menjalankan fungsi dan tugas.
- c. Dewan Komisaris berperan aktif, mengawasi dan menilai pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

2.11 Peranan Komite Audit

Keberadaan komite audit merupakan salah satu kriteria penerapan *Good Corporate Governance*. Jumlah keanggotaan komite audit dalam suatu perusahaan ditentukan oleh ukuran bisnis dan kompleksitas permasalahan yang ditangani oleh perusahaan tersebut. Namun pada umumnya, komite audit terdiri dari tiga sampai dengan lima orang anggota. Para anggota tersebut diambil dari dewan komisaris, bukan dari dewan direksi, agar objektivitasnya terhadap manajemen tetap terjaga.

Tujuan utama pembentukan komite audit dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan objektivitas dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Selain itu komite audit memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain :

- a. Memperbaiki kualitas pelaporan keuangan.
- b. Memungkinkan dewan komisaris untuk memberikan penilaian yang independen atas kinerja keuangan perusahaan.
- c. Memperkuat posisi auditor eksternal dalam memberikan rekomendasi perbaikan.
- d. Memperkuat independensi dan objektivitas internal audit.

- e. Meningkatkan keyakinan publik, khususnya investor, terhadap perusahaan.
- f. Mengurangi peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam perusahaan.

Kewajiban-kewajiban komite audit sangat bervariasi sesuai dengan jenis dan karakter industri atau perusahaan yang bersangkutan. Namun secara garis besar, tugas-tugas tersebut meliputi :

- a. Melakukan penelaahan atas pelaporan keuangan perusahaan, menyangkut kelengkapan, ketepatan, dan kewajaran laporan tersebut.
- b. Melakukan penelaahan atas pengendalian internal perusahaan untuk memastikan bahwa sistem tersebut telah memadai dan berfungsi dengan baik.
- c. Melakukan penelaahan atas departemen internal audit untuk menilai keandalan hasil pekerjaan departemen tersebut.
- d. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap hukum, perundangan, dan kebijakan internal.
- e. Mempertimbangkan penunjukan auditor eksternal dan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan audit.
- f. Memberikan masukan dan informasi kepada dewan komisaris berkaitan dengan pelaporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan.

2.12 Peranan Direksi

Peranan direksi adalah sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi pemegang

saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Seperti halnya komisaris, direksi juga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi. Selain itu, komposisi Direksi juga diatur sedemikian rupa, sekurangnya 20% anggota Direksi haruslah merupakan orang luar. Karakteristik peranan Direksi dalam implementasi *Good Corporate Governance* sesuai riset yang dilakukan IICG adalah :

- a. Direksi melakukan pembahasan secara berkala dengan Dewan Komisaris mengenai keadaan perusahaan secara keseluruhan yang kemudian menghasilkan saran, perbaikan dan rekomendasi yang nyata bagi kemajuan perusahaan.
- b. Kinerja Direksi diperhatikan dan dinilai secara berkala dan dievaluasi setiap jangka waktu tertentu.

2.13 Tinjauan Penelitian Terdahulu

2.13.1 Hubungan *Corporate Governance* dan Pengungkapan Informasi : Pengujian Secara Simultan (Khomsiyah), 2003

Penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan tingkat pengungkapan informasi. Berdasarkan teori yang ada, seharusnya semakin tinggi penerapan *Corporate Governance*, yang diukur dengan indeks persepsi *Corporate Governance* semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan pengungkapan informasi dan banyaknya informasi yang diungkapkan.

Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan laporan tahunan perusahaan-perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001 dan 2002. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, yang masuk dalam pemeringkatan penerapan *Corporate Governance* yang dilakukan oleh IICG.

Variabel dalam penelitian tersebut ada dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu Indeks Pengungkapan, Ukuran perusahaan, Struktur kepemilikan, Dewan komisaris, Komite Audit dan Regulasi. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Indeks *Corporate Governance*. Indeks ini merupakan hasil pemeringkatan atas penerapan *Corporate Governance* oleh lembaga riset independen *The Indonesian Institute for Corporate Governance*.

Dari hasil pengolahan data yang ada maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Hasil pengujian Hausman menunjukkan adanya masalah simultanitas persamaan. Penelitian ini menggunakan metode *two stage least square* (2SLS), karena metode ini akan memberikan estimator yang efisien dan konsisten (Gujarati, 1995)

- b. Analisis korelasi sederhana menunjukkan adanya hubungan antara implementasi *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi. Ukuran perusahaan dan regulasi secara positif berhubungan dengan indeks *corporate governance* dan pengungkapan informasi. Struktur kepemilikan masyarakat, komposisi dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit mempunyai hubungan yang signifikan dengan indeks *corporate governance* dan pengungkapan informasi. Namun dalam penelitian ini tidak berhasil memberikan bukti adanya korelasi antara komposisi komisaris independen dan komite audit dengan indeks pengungkapan wajib.
- c. Regulasi merupakan variabel eksogen yang mempengaruhi implementasi *corporate governance*. Perusahaan yang mempunyai regulasi yang tinggi yaitu perbankan mempunyai indeks *corporate governance* yang lebih baik. Sedangkan ukuran perusahaan yang diprediksi akan mempengaruhi implementasi *corporate governance* tidak mampu dibuktikan dalam penelitian ini.

2.13.2 Analisis Hubungan Antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan (Ainun Na'im dan Fu'ad Rakhman), 2000

Setiap perusahaan diwajibkan membuat Laporan Keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan independen sebagai sarana pertanggungjawaban, terutama kepada pemilik modal. Agar dapat dipahami oleh pengguna, Laporan Keuangan harus diberi pengungkapan secara memadai. Pengungkapan tersebut dapat berupa penjelasan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan, kontinjensi, metode persediaan dan sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana aspek struktur modal perusahaan berpengaruh pada kelengkapan pengungkapan Laporan Keuangan perusahaan dan menjelaskan karakteristik hubungan yang mungkin yang terjadi. Selain itu penelitian ini ingin mengungkap pengaruh proporsi investor independen terhadap kelengkapan pengungkapan Laporan Keuangan perusahaan dan menjelaskan karakteristik hubungan yang mungkin terjadi.

Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah Laporan Keuangan perusahaan publik tahun 1996 yang tersedia di Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM), Bursa Efek Jakarta. Sampel yang digunakan adalah Laporan Keuangan 32 perusahaan non-perbankan.

Variabel dalam penelitian tersebut ada dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu kelengkapan pengungkapan Laporan Keuangan perusahaan. Variabel ini mengukur berapa banyak butir Laporan

Keuangan yang material diungkap oleh perusahaan. Butir pengungkapan Laporan Keuangan yang diukur meliputi yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*). Sedangkan variabel independennya meliputi struktur modal (*financial leverage*) dan tipe kepemilikan perusahaan (prosentase kepemilikan oleh publik).

Dari hasil pengolahan data dapat diambil kesimpulan secara statistik bahwa leverage keuangan perusahaan memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap indeks kelengkapan pengungkapan. Akan tetapi tidak ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara prosentase kepemilikan saham oleh publik dengan kelengkapan pengungkapan.

2.14 Hipotesis Penelitian

Pengembangan hipotesis dilakukan dengan review literatur, paper dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hubungan antara penerapan *Good Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan publik yang terdaftar di BEJ dalam rangka untuk mengurangi asimetri informasi.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan publik yang diperoleh dari Bursa Efek Jakarta pada periode 2001-2003. Serta data hasil riset dari *The Indonesian Institute for Corporate Governance* yang berupa *Corporate Governance Perception Index* yang mengukur implementasi *Corporate Governance* pada

perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Dari indeks tersebut rating atau pemeringkatan disusun. Alasan penggunaan indeks ini disebabkan oleh keterbatasan data tentang penelitian penerapan *Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Indeks tersebut merupakan satu-satunya indeks yang dipublikasikan dari hasil penelitian pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peneliti sebelumnya yang telah melakukan studi di bidang ini adalah Khomsiyah G. Indaryanto, 2003, yang menguji simultanitas hubungan penerapan *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan Informasi. Artinya, peneliti mencoba untuk menguji secara simultan, karena peneliti menganggap bahwa terdapat kemungkinan bahwa penerapan *Corporate Governance* dengan keputusan pengungkapan informasi mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Berdasarkan teori yang ada, seharusnya semakin tinggi penerapan *Corporate Governance*, yang diukur dengan indeks persepsi *Corporate Governance* semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan terhadap peraturan pengungkapan informasi dan banyaknya informasi yang diungkapkan. Dua kajian teoretis dan empiris menjadi dasar pengembangan hipotesis penelitian ini. Kajian pertama mengaitkan *Corporate Governance* dengan asimetri informasi, dan kedua mengidentifikasi hubungan antara pengungkapan informasi dengan asimetri informasi.

Teori keagenan menunjukkan hubungan antara pihak yang bekerja sama tapi mempunyai posisi yang berbeda. Yaitu pihak pertama adalah prinsipal (pemilik)

yang mendelegasikan pekerjaan pada pihak kedua yaitu agen (manajemen) dengan menggunakan istilah kontrak (Khomsiyah, 2003). Manajemen sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari pemilik harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Di lain pihak, pemilik sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif pada manajemen berupa berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non finansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam pemberian informasi yang akan digunakan oleh pemilik untuk memberikan insentif pada manajemen. Hal lain yang membuat permasalahan adalah persepsi kedua belah pihak dalam menanggung resiko (Eisenhard, 1989). Manajemen yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan informasi secara menyeluruh atas kepemilikan prinsipal. Sedangkan prinsipal meminta manajemen memberikan informasi selengkapnyanya. Akan tetapi keinginan prinsipal tersebut pada umumnya sulit dipenuhi. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor seperti : biaya penyajian informasi, keinginan manajemen menghindari resiko untuk terlihat kelemahannya, waktu yang digunakan untuk menyajikan informasi, dan sebagainya. Sehingga timbul ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) karena ketiadaan harmonisasi antara manajemen dan pemilik. Kondisi tersebut memungkinkan adanya konflik antara pemilik dan manajemen. *Corporate Governance* merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholders*. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak

pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *Corporate Governance* menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat.

Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting untuk mengatasi masalah keagenan antara manajemen dan pemilik, karena dipandang sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi. Perusahaan memberikan pengungkapan melalui laporan tahunan yang telah diatur oleh Bapepam dan lembaga profesi maupun melalui pengungkapan sukarela sebagai tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa perusahaan yang melaksanakan *Corporate Governance* akan memberikan lebih banyak informasi, dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan, semakin baik pelaksanaan *Corporate Governance* oleh suatu perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkap.

Dari uraian diatas, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini merupakan hipotesis alternatif, yaitu :

H_0 : Tidak terdapat hubungan positif antara *Corporate Governance* dengan pengungkapan

H_a : Terdapat hubungan positif antara *Corporate Governance* dengan pengungkapan.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksploratoris, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang saling berhubungan antara pelaksanaan *Corporate Governance* oleh perusahaan dengan pengungkapan informasi yang berupa laporan tahunan perusahaan. Pada bab ini penulis akan mengemukakan data-data yang diperlukan yang meliputi data penelitian, spesifikasi populasi, spesifikasi variabel, analisa data, hasil analisis dan pengujian hipotesis.

3.1. Data penelitian

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data yang bersifat sekunder, yaitu dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

1. *Indonesian Capital Market Directory*.

Data berupa laporan keuangan tahunan periode 2000 – 2002, yang telah dipublikasikan pada *Indonesian Capital Market Directory* tahun 2001-2003, memuat Annual Report yang meliputi Neraca dan Laporan Laba Rugi untuk tahun 2000 – 2002. Hal ini karena pada periode tersebut data laporan keuangan perusahaan *Go Public* dianggap cukup mewakili, sehingga para pemakai laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal dapat mengetahui kemungkinan bahwa penerapan *Corporate Governance* dan pengungkapan informasi mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Bagi pihak eksternal hal ini sangat bermanfaat terutama dalam membuat keputusan apakah akan

melakukan investasi atau tidak pada suatu perusahaan. Bagi pihak internal ini sangat erat kaitannya dengan perumusan dan penetapan kebijakan perusahaan.

2. *The Indonesian Institute for Corporate Governance*

Data yang bersifat sekunder dari lembaga riset independen *The Indonesian Institute for Corporate Governance* yang berupa *Corporate Governance Perception Index* dari tahun 2001-2003.

3. *Website Jakarta Stock Exchange*

3.2. Spesifikasi Populasi

Penelitian ini menggunakan data populasi yang terdiri dari 42 perusahaan.

Pemilihan data populasinya berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan yang menerapkan *Corporate Governance*
2. Perusahaan yang bersedia disurvei oleh IICG dan masuk dalam pemeringkatan penerapan *Corporate Governance* tahun 2001-2003.

3.3. Spesifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (Independent Variable) dan variabel terikat (Dependent Variable). (Khomsiyah, 2003).

a. Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini meliputi :

- (1) Indeks Pengungkapan (Edy Subiyantoro, 1997)

Indeks pengungkapan disini merupakan peraturan mengenai butir Laporan Keuangan minimum yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan yang diatur secara rinci dalam Standar Akuntansi Keuangan. Menghitung variabel independen dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IP = \frac{n}{K}$$

Keterangan :

IP : Indeks pengungkapan

n : Jumlah butir pengungkapan yang dipenuhi

K : Jumlah semua butir yang mungkin dipenuhi

Angka indeks maksimum dalam instrumen ini adalah 1. Perusahaan yang memiliki angka indeks 1 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pengungkapan Laporan Keuangan secara penuh.

(2) Size atau ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dinilai berdasarkan total aktiva yang dimiliki perusahaan yang tercantum dalam neraca perusahaan.

(3) Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan dalam penelitian ini berdasarkan prosentase kepemilikan non manajer dan kepemilikan masyarakat.

(4) Dewan Komisaris

Dalam hal ini, peneliti menekankan pada komposisi keberadaan komisaris independen terhadap jumlah seluruh dewan komisaris.

Artinya sekurang-kurangnya 20% anggota dewan komisaris haruslah merupakan orang luar untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi musyawarah yang dilakukan dewan komisaris. Pengukurannya dengan menggunakan variabel dummy, yaitu bernilai 1 jika perusahaan memiliki susunan komisaris independen sesuai dengan peraturan BEJ dan bernilai 0 jika tidak memiliki komisaris independen.

(5) Komite Audit

Keberadaan komite audit merupakan salah satu kriteria penerapan *Good Corporate Governance*. Komite audit terdiri dari tiga sampai dengan lima orang anggota. Para anggota tersebut diambil dari dewan komisaris, bukan dari dewan direksi, agar objektivitasnya terhadap manajemen terjaga. Pengukurannya dengan menggunakan variabel dummy, yaitu bernilai 1 jika perusahaan memiliki susunan komite audit sesuai dengan peraturan BEJ dan bernilai 0 jika tidak memiliki komite audit.

(6) Regulasi

Perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat regulasi yang sangat tinggi, yaitu perbankan akan cenderung menerapkan *Corporate Governance* dengan lebih baik. Pengukurannya dengan menggunakan variabel dummy, yaitu bernilai 1 jika perusahaan adalah perbankan atau perusahaan yang memiliki tingkat regulasi yang tinggi dan bernilai 0 jika tidak memiliki tingkat regulasi yang tinggi atau bukan perbankan.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks *Corporate Governance*. Indeks ini merupakan hasil pemeringkatan atas penerapan *Corporate Governance* oleh lembaga riset independen *The Indonesian Institute for Corporate Governance*.

3.4. Analisis dan Pengolahan Data

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi. Penelitian ini mencoba untuk menguji hubungan secara simultan, karena peneliti menganggap bahwa terdapat kemungkinan bahwa penerapan *Corporate Governance* dengan keputusan pengungkapan informasi mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Indeks *Corporate Governance* yang tinggi mungkin disebabkan adanya penerapan transparansi yang baik oleh perusahaan, atau pengungkapan informasi yang tinggi merupakan keputusan manajemen yang telah menerapkan *Good Corporate Governance*.

Penelitian ini akan menguji faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerapan *Corporate Governance* yaitu ukuran perusahaan dan regulasi. Asumsi yang menjadi dasar adalah bahwa penerapan *Corporate Governance* memerlukan biaya yang besar, dengan demikian perusahaan yang besar akan lebih mampu untuk menerapkan *Corporate Governance*. Perusahaan yang mempunyai regulasi

yang sangat tinggi (perbankan) akan cenderung untuk menerapkan *Corporate Governance* dengan lebih baik.

Persamaan simultan hubungan antara *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi (Khomsiyah, 2003), adalah sebagai berikut :

$$CGPI = \alpha_0 + \alpha_1 IP + \alpha_2 REG + \alpha_3 SIZE + \varepsilon_{1t} \quad (1)$$

$$IP = \alpha_0 + \alpha_1 CGPI + \alpha_2 SK + \alpha_3 DK + \alpha_4 KA + \alpha_5 SIZE + \varepsilon_{2t} \quad (2)$$

Keterangan :

CGPI : Indeks Persepsi *Corporate Governance*

IP : Indeks Pengungkapan

REG : Regulasi

SK : Struktur Kepemilikan

DK : Komposisi Dewan Komisaris

KA : Keberadaan Komite Audit

SIZE : Ukuran Perusahaan

α : Intersep model

ε : *Error term* model

Berdasarkan persamaan simultan diatas, maka peneliti menggunakan beberapa pengujian sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif

Pengujian ini untuk menentukan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan dependen.

2. Korelasi Sederhana

Pengujian ini untuk menentukan korelasi antara variabel independen dan dependen, yang bertujuan untuk mengetahui apakah sesuai dengan hipotesis yaitu, implementasi *Corporate Governance* mempunyai hubungan dengan pengungkapan informasi.

3. Analisis Two Stage Least Square

Pengujian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat simultanitas antara dua persamaan diatas yaitu dengan menggunakan pengujian Hausman. Bila dengan pengujian spesifikasi Hausman ini diketahui adanya simultanitas, maka metode *two stage least square* (2SLS) akan memberikan estimator yang efisien dan konsisten. Pengujian Hausman dilakukan untuk menguji eksogenitas variabel *Corporate Governance* dan pengungkapan informasi.

Analisis Regresi dua tahap dengan menggunakan program SPSS 10, yaitu tahap pertama adalah melakukan regresi indeks pengungkapan (IP) terhadap indeks persepsi *Corporate Governance* dan seluruh variabel eksogen dalam persamaan (1) dan (2). Tahap kedua melakukan regresi untuk persamaan (1) dengan menggunakan *fitted value* IP dari hasil regresi tahap pertama. Prosedur yang sama dilakukan untuk regresi persamaan (2).

Persamaan uji Hausman dirumuskan dengan formula sebagai berikut :

$$CGPI = \alpha_0 + \alpha_1 \hat{IP} + \alpha_2 \varepsilon_{3t} \quad (3)$$

$$IP = \alpha_0 + \alpha_1 \hat{CGPI} + \alpha_2 \varepsilon_{4t} \quad (4)$$

Keterangan :

- α_0 : Konstanta
- α_1 : Koefisien Regresi
- \hat{IP} : Nilai Taksiran IP
- ε_{3t} : Nilai Residu IP
- \hat{ICG} : Nilai Taksiran CGPI
- ε_{4t} : Nilai Residu CGPI

3.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan *Corporate Governance* (yang dilihat dari indeks *Corporate Governance*) memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat pengungkapan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Pengujian secara parsial dipergunakan untuk mengetahui apakah koefisien regresi variabel independen (X) hasil estimasi secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \beta = 0$; variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta \neq 0$; variabel independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Menetapkan *level of significant* sebesar 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan *degree of freedom* (df) = $n-k-1$ untuk mengetahui nilai t_{tabel} pada daerah penerimaan dan penolakan H_0 .
- c. Perhitungan nilai t dengan program SPSS.
- d. Pengambilan keputusan melalui perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel}

sebagai berikut :

- $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$: berarti menerima H_0 dan menolak H_a

- $t_{\text{tabel}} > -t_{\text{hitung}} ; t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$: berarti menolak H_0 dan menerima H_a

- e. Kesimpulan :

Apabila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_a diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara *Corporate Governance* dengan pengungkapan.

Apabila $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *Corporate Governance* dengan pengungkapan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

4.1.1 Corporate Governance Perception Index

Corporate Governance Perception Index adalah hasil pemeringkatan atas penerapan *Corporate Governance* atau survey implementasi *Corporate Governance* pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance*.

Berikut adalah perusahaan yang menjadi sample dalam penelitian ini :

Tabel 4.1

Daftar emiten berdasarkan survey IICG tahun 2001

no.	PERUSAHAAN	CGPI
1	Timah	78,94
2	Astra Internasional	77,19
3	Bank BCA	76,56
4	Bank CIC	75,88
5	Aneka Tambang	70,75
6	Medco Energi Internasional	69,56
7	Metrodata Electronic	66,13
8	Matahari Putra Prima	66,06
9	Kalbe Farma	65,19
10	Bimantara Citra	65,13
11	Astra Graphia	65,00
12	Dankos Laboratories	64,75
13	Bank BII	63,88
14	Citra Marga Nusapala Persada	63,25
15	Charoen Pokphand Indonesia	61,94
16	Komatsu Indonesia	59,44
17	Lautan Luas	58,88
18	Astra Otoparts	58,76
19	Makindo	55,13
20	United Tractor	53,88
21	Gajah Tunggal	51,31
22	Bahtera Adimina Samodera	48,94

Tabel 4.2

Daftar emiten berdasarkan survey IICG tahun 2002

no.	PERUSAHAAN	CGPI
1	Bank BCA	90,46
2	Bank Universal	89,05
3	Bank Niaga	88,55
4	Kalbe Farma	88,42
5	Astra Internasional	87,95
6	Bank Lippo	87,43
7	Bank BNI	87,00
8	Unilever Indonesia	86,93
9	Bimantara Citra	85,31
10	Dankos Laboratories	85,17

Tabel 4.3

Daftar emiten berdasarkan survey IICG tahun 2003

no.	PERUSAHAAN	CGPI
1	Astra Internasional	81,20
2	Unilever Indonesia	76,86
3	Astra Graphia	76,76
4	Medco Energi Internasional	74,86
5	Bank Niaga	74,16
6	Kalbe Farma	72,84
7	Dankos Laboratories	72,46
8	Bank Bumiputera Indonesia	70,70
9	BFI Finance Indonesia	68,60
10	Bimantara Citra	68,56

4.1.2 Data Statistik Deskriptif

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ICG	42	48.94	90.46	72.1624	11.428
IW	42	.52	0.99	0.9160	8.32E-02
IS	42	.23	0.93	0.7131	0.1506
REG	42	0	1	0.2381	0.4311
KNM	42	.06	99.12	66.60667	21.28275
PUBLIK	42	.88	81.82	29.67405	16.70586
DK	42	0	1	0.78571	0.41530
KA	42	0	1	0.80952	0.39744
SIZE	42	3.99171E+11	1.29053E+13	1.40748E+13	1.86709E+13
Valid N (listwise)	42				

Tabel 4 menyajikan statistik deskriptif variabel dependen dan independen. Berdasarkan 42 perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata indeks corporate governance sebesar 72,16% dengan indeks maksimum sebesar 90,46% dan nilai minimum 48,94%. Rata-rata indeks pengungkapan wajib sebesar 91,6%, dengan nilai maksimum sebesar 99% dan nilai minimum sebesar 52%. Rata-rata indeks pengungkapan sukarela sebesar 71,31% dengan nilai maksimum sebesar 93% dan minimum 23%. Kepemilikan saham maksimum oleh non manajer sebesar 99,12% dan minimum sebesar 0,06%. Rata-rata kepemilikan saham oleh non manajer sebesar 66,6% hal ini berarti rata-rata kepemilikan saham oleh manajer sebesar 33,4%. Kepemilikan oleh masyarakat atau publik menunjukkan rata-rata sebesar 29,67%, maksimum 81,82% dan minimum 0,88%. Sedangkan rata-rata total aktiva sebagai proksi ukuran perusahaan menunjukkan nilai sebesar 14.074.812 juta dengan nilai maksimum 12.905.315 juta dan nilai minimum sebesar 399.171 juta.

4.2 Korelasi

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Korelasi antar Variabel

	Indeks CG	Indeks wajib	Indeks sukarela	Regulasi	Kepemilikan Non Manajer	Kepemilikan Publik	Dewan Komisaris	Komite Audit	Size
Indeks CG	1.000 (.003)	.450** (.003)	.410** (.007)	.406** (.008)	.058 (.717)	-.136 (.391)	.673** (.000)	.665** (.000)	.420** (.006)
Indeks wajib	.450** (.003)	1.000	.759** (.000)	.333* (.031)	.046 (.772)	-.070 (.660)	.144 (.364)	.175 (.267)	.292 (.060)
Indeks sukarela	.410** (.007)	.759** (.000)	1.000	.541** (.000)	-.047 (.770)	-.107 (.502)	.112 (.479)	.043 (.788)	.392* (.010)
Regulasi	.406** (.008)	.333* (.031)	.541** (.000)	1.000	.016 (.920)	-.353 (.022)	.156 (.325)	.129 (.416)	.621** (.000)
Kepemilikan Non Manajer	.058 (.717)	.046 (.772)	-.074 (.770)	.016 (.920)	1.000	-.784** (.000)	.122 (.440)	.112 (.482)	.071 (.655)
Kepemilikan Publik	-.136 (.391)	-.070 (.660)	-.107 (.502)	-.353* (.022)	.784** (.000)	1.000	-.038 (.810)	-0.05 (.973)	-.236 (.133)
Dewan Komisaris	.673** (.000)	.144 (.364)	.112 (.479)	.156 (.325)	.122 (.440)	-.038 (.810)	1.000	.929** (.000)	.162 (.305)
Komite Audit	.665** (.000)	.175 (.267)	.043 (.788)	.129 (.416)	.112 (.482)	-0.05 (.973)	.929** (.000)	1.000	.147 (.354)
Size	.420** (.006)	.292 (.061)	.392** (.010)	.621** (.000)	.071 (.655)	-.236 (.133)	.162 (.305)	.147 (.354)	1.000

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

4.2.1 Hubungan CGPI dan Indeks Pengungkapan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi. Tabel 4.5 menunjukkan korelasi antara variabel independen dan variabel dependen.

- a. Sesuai dengan hipotesis, implementasi *Corporate Governance* mempunyai hubungan dengan pengungkapan informasi, baik secara wajib maupun sukarela. Artinya tingginya kualitas informasi akuntansi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menerapkan *Corporate Governance* tersebut sangat berkaitan dengan tingkat kelengkapan. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam penerapan *Corporate Governance* yaitu menjamin adanya pemberian informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders* serta pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.
- b. Regulasi secara positif berhubungan secara signifikan dengan indeks *Corporate Governance*. Artinya penerapan *Good Corporate Governance* merupakan kepatuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Bapepam. Hal ini berarti sesuai dengan prinsip tanggungjawab dalam penerapan *Corporate Governance* yaitu tanggungjawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada untuk mengungkapkan informasinya untuk mematuhi

- peraturan-peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.
- c. Struktur kepemilikan non manajer dan kepemilikan publik tidak berhasil memberikan bukti adanya korelasi dengan indeks *Corporate Governance* dan indeks pengungkapan baik wajib maupun sukarela. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dalam penerapan *Corporate Governance* karena seharusnya perusahaan dengan struktur kepemilikan masyarakat yang tinggi, cenderung untuk memberikan pengungkapan yang lebih banyak.
 - d. Keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit hanya berhubungan dengan indeks *Corporate Governance*. Hal ini sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam penerapan *Corporate Governance* yaitu menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara dewan komisaris, manajemen, pemegang saham, dan auditor yang meliputi *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya.
 - e. Ukuran perusahaan secara positif berhubungan secara signifikan dengan indeks *Corporate Governance*, sesuai dengan asumsi dasarnya yaitu penerapan *Corporate Governance* memerlukan biaya yang besar, dengan demikian perusahaan yang besar akan lebih

mampu menerapkan *Corporate Governance* dengan lebih baik. Ukuran perusahaan terbukti mempunyai hubungan yang signifikan pada tingkat 1% dengan indeks pengungkapan sukarela, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan indeks pengungkapan wajib. Artinya, tinggi rendahnya kualitas informasi akuntansi yang diprosikan dengan tingkat kelengkapan, tidak mempunyai hubungan dengan besar kecilnya ukuran perusahaan.

4.3 Analisis Regresi menggunakan Two Stage Least Square

4.3.1 Indeks Pengungkapan Wajib

4.3.1.1 Analisis Persamaan I

Gujarati (1995:670) menyatakan, jika tidak terdapat masalah simultanitas, estimator *ordinary least square* (OLS) akan menghasilkan estimator yang efisien dan konsisten. Namun jika terdapat simultanitas, metode *two stage least square* (2SLS) akan memberikan estimator yang efisien dan konsisten. Pengujian ini perlu dilakukan untuk mengetahui masalah simultanitas tersebut. Berdasarkan pengujian spesifikasi Hausman (tabel 4.6) untuk indeks pengungkapan wajib, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang simultan antara indeks *Corporate Governance* dengan indeks pengungkapan wajib, dengan nilai t sebesar 3.184 ($p=0.003$). dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan simultan.

Tabel 4.6
Uji Simultanitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.013	8.057		5.835	.000
	<i>Fit for CGPI from 2SLS</i>	.349	.109	.450	3.184	.003

Dependent Variable : CGPI

Tabel 4.7

Pengujian simultan Indeks *Corporate Governance* dengan Indeks Wajib

$$CGPI = \alpha_0 + \alpha_1 IW + \alpha_2 REG + \alpha_3 SIZE + \varepsilon_{1t} \quad (1)$$

	α_0	α_1	α_2	α_3
Koefisien	28.177	45.566	4.103	9.041E-14
t-statistics	1.576 (.123)	2.302 (.027)	.880 (.384)	1.308 (.199)

Dependent variable : CGPI

Tabel 4.7 menunjukkan hasil pengujian dengan metode *two stage least square* (2SLS). Hasil pengujian terhadap persamaan (1) menunjukkan bahwa indeks pengungkapan wajib mempengaruhi indeks *Corporate Governance*. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib yang diberikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan tahunan, semakin tinggi pula tingkat implementasi *Corporate Governance* oleh perusahaan demikian juga sebaliknya. Indeks *Corporate Governance* yang tinggi disebabkan adanya penerapan transparansi yang baik oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan yang diprediksikan sebelumnya bahwa *Corporate Governance* merupakan upaya

untuk melindungi investor dari adanya asimetri informasi yang dapat dilihat dari tingkat pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan.

Variabel regulasi tidak mampu membuktikan bahwa variabel tersebut mempengaruhi indeks *Corporate Governance*. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung lebih kecil dari t tabelnya, ini berarti bahwa variabel tidak signifikan dengan taraf 5 %. Hal ini bertentangan dengan asumsi dasarnya, yaitu perusahaan yang mempunyai tingkat regulasi yang tinggi akan menerapkan *Corporate Governance* dengan lebih baik. Selain itu asumsi dasar bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi indeks *Corporate Governance*, juga tidak dapat dibuktikan dalam regresi persamaan (1). Penelitian ini tidak memberikan dukungan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini mungkin disebabkan perbedaan pengukuran atas proksi ukuran perusahaan.

4.3.1.2 Analisis Persamaan II

Tabel 4.8

Pengujian Simultan Indeks *Corporate Governance* dengan Indeks wajib

$$IW = \alpha_0 + \alpha_1 \text{CGPI} + \alpha_2 \text{SK} + \alpha_3 \text{DK} + \alpha_4 \text{KA} + \alpha_5 \text{SIZE} + \varepsilon_{2t} \quad (2)$$

	α_0	α_1	α_2	α_3	α_4	α_5
Koefisien	.5266	.0042	.0015	-.0802	.0213	-2.1079E-17
t-statistics	3.489	2.504	1.076	-1.007	.254	-.038
	(.001)	(.015)	(.290)	(.321)	(.801)	(.970)

Dependent variable : IW

Hasil estimasi persamaan (2) juga mendukung hipotesis. Sebagaimana yang diprediksi sebelumnya menunjukkan bahwa Indeks *Corporate Governance* mempengaruhi indeks pengungkapan wajib. Hasil uji t menunjukkan nilai t

hitung lebih besar dari t tabelnya, ini berarti bahwa variabel signifikan dengan taraf 5 %. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi yang diberikan perusahaan atau semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan, semakin tinggi pula tingkat implementasi *Corporate Governance*. Dengan kata lain bahwa *Corporate Governance* merupakan upaya untuk melindungi investor dari adanya asimetri informasi yang dapat dilihat dari tingkat pengungkapan informasi yang diberikan oleh perusahaan. Variabel komposisi kepemilikan saham oleh publik terbukti tidak mempengaruhi indeks pengungkapan wajib. Hal ini bertentangan dengan asumsi dasar yang menyatakan bahwa semakin banyak saham yang dimiliki oleh masyarakat, semakin tinggi pengungkapan yang harus diberikan oleh perusahaan. Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khomsiyah (2003), keberadaan komite audit dan dewan komisaris independen juga tidak terbukti mempengaruhi indeks pengungkapan wajib. Selain itu, total aktiva sebagai proksi ukuran perusahaan juga tidak mampu mempengaruhi indeks pengungkapan wajib. Penelitian ini juga tidak memberikan dukungan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini mungkin disebabkan perbedaan pengukuran atas proksi ukuran perusahaan.

4.3.2 Indeks Pengungkapan Sukarela

4.3.2.1 Analisis Persamaan I

Berdasarkan pengujian spesifikasi Hausman untuk indeks pengungkapan sukarela, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan

yang simultan antara indeks *Corporate Governance* dengan indeks pengungkapan sukarela, dengan nilai t sebesar 2.847 ($\rho=0.007$). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan simultan.

Tabel 4.9
Uji Simultanitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.683	13.265		2.615	.013
	<i>Fit for CGPI from 2SLS</i>	.519	.182	.410	2.847	.007

Dependent Variable : CGPI

Tabel 4.10
Pengujian Simultan Indeks *Corporate Governance* dengan Indeks Sukarela

$$CGPI = \alpha_0 + \alpha_1 IS + \alpha_2 REG + \alpha_3 SIZE + \varepsilon_{1t} \quad (1)$$

	α_0	α_1	α_2	α_3
Koefisien	56.520	18.942	3.083	9.952E-14
t-statistics	6.541 (.000)	1.494 (.143)	.593 (.557)	1.392 (.172)

a. Dependent variable : CGPI

Tabel 4.10 menunjukkan hasil pengujian dengan metode *two stage least square* (2SLS). Hasil pengujian terhadap persamaan (1) menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak terbukti dapat mempengaruhi indeks *Corporate Governance*. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam *Corporate Governance* yaitu transparansi dan responsibilitas. Tingkat kelengkapan yang merupakan kualitas informasi yang dikeluarkan perusahaan adalah salah satu bentuk dari prinsip *Corporate Governance*, namun dalam penelitian ini tidak

mampu membuktikan bahwa tingkat pengungkapan sukarela yang diberikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan tahunan, akan mempengaruhi tingkat implementasi *Corporate Governance*. Begitu pula dengan regulasi dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi indeks *Corporate Governance*. Padahal seharusnya kedua variabel tersebut dapat mempengaruhi indeks *Corporate Governance*, karena prinsip responsibilitas dalam penerapan *Corporate Governance* adalah tanggungjawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada untuk mengungkapkan informasinya untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Dalam hal ini kepatuhan terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Bapepam.

4.3.2.2 Analisis Persamaan II

Tabel 4.11

Pengujian Simultan Indeks *Corporate Governance* dengan Indeks Sukarela

$$IS = \alpha_0 + \alpha_1 CGPI + \alpha_2 SK + \alpha_3 DK + \alpha_4 KA + \alpha_5 SIZE + \varepsilon_{2t} \quad (2)$$

	α_0	α_1	α_2	α_3	α_4	α_5
Koefisien	.2223	.0059	.0021	.0956	-.2179	-1.397E-17
t-statistics	.892	2.179	.889	.727	-1.577	-.015
	(.379)	(.036)	(.380)	(.472)	(.124)	(.988)

Dependent variable : IS

Hasil estimasi persamaan (2) juga mendukung hipotesis. Sebagaimana yang diprediksi sebelumnya menunjukkan bahwa Indeks *Corporate Governance* mempengaruhi indeks pengungkapan sukarela. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat implementasi *Corporate Governance* semakin tinggi pula tingkat

pengungkapan sukarela yang diberikan perusahaan yang berupa pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Penelitian ini sesuai dengan teori dan hipotesis sebelumnya. Sedangkan variabel-variabel lain dalam persamaan (2) terbukti tidak mempengaruhi indeks pengungkapan sukarela. Variabel komposisi kepemilikan saham oleh publik yang diprediksikan mampu mempengaruhi hubungan positif dengan pengungkapan, ternyata sebaliknya. Sehingga asumsi bahwa semakin banyak saham yang dimiliki oleh masyarakat, semakin tinggi pengungkapan yang harus diberikan oleh perusahaan, tidak dapat diberlakukan dalam penelitian ini.

Keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit sebagai salah satu proksi dari prinsip akuntabilitas juga tidak mampu memberikan bukti dapat mempengaruhi indeks pengungkapan sukarela. Artinya, penciptaan sistem pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dan komite audit tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela yang diberikan oleh perusahaan. Seperti penelitian-penelitian sebelumnya ukuran perusahaan dalam penelitian ini juga tidak mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap indeks pengungkapan sukarela.

4.4 Diskusi Hasil dan Implementasi Manajerial

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah penerapan *Good Corporate Governance* mempunyai hubungan dengan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan

keuangan tahunan. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khomsiyah (2003), yang menyatakan semakin tinggi indeks persepsi *Corporate Governance* suatu perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasinya. Analisis korelasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* mempunyai hubungan dengan pengungkapan informasi baik wajib maupun sukarela. Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan *Corporate Governance* akan memberikan lebih banyak informasi, sebagai wujud tanggung jawab kepada *stakeholders* yang menggunakan laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusannya.

Analisis regresi *two stage least square* yang telah dilakukan terhadap indeks pengungkapan wajib dan indeks persepsi *Corporate Governance* menyatakan bahwa diantara keduanya ada hubungan yang saling mempengaruhi. Artinya tingginya indeks persepsi *Corporate Governance* dipengaruhi oleh tingkat pengungkapan wajib yang dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan Bapepam. Begitu juga sebaliknya, tingginya indeks pengungkapan wajib juga dipengaruhi oleh tingginya penerapan *Good Corporate Governance* oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan ingin mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham (pemilik perusahaan). Oleh karena itu *Corporate Governance* merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk *stakeholders*.

Penerapan *Good Corporate Governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas.

Sedangkan analisis regresi *two stage least square* terhadap indeks pengungkapan sukarela dan indeks persepsi *Corporate Governance* terbukti hanya indeks *Corporate Governance* yang dapat mempengaruhi indeks pengungkapan sukarela. Sedangkan indeks pengungkapan sukarela tidak terbukti dapat mempengaruhi indeks *Corporate Governance*. Artinya tingginya penerapan *Good Corporate Governance* oleh perusahaan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela yang dituangkan dalam butir-butir yang diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan penerapan *Good Corporate Governance* oleh perusahaan tidak terbukti mampu mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini bertentangan dengan teori tentang prinsip-prinsip dalam *Corporate Governance* yaitu transparansi dan responsibilitas, selain itu juga tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sabeni (2002) yang menyatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* oleh perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan sukarela.

Tingkat kelengkapan yang merupakan kualitas informasi yang dikeluarkan perusahaan melebihi peraturan yang disyaratkan oleh Bapepam adalah salah satu bentuk dari prinsip *Corporate Governance*. Namun bila pengungkapan itu terlalu banyak maka akan memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah, sehingga beberapa pihak justru berpendapat tidak baik.

Informasi yang terlalu melimpah akan mengungkapkan detail-detail yang tidak begitu penting justru akan menutup informasi yang signifikan dan menyebabkan Laporan Keuangan sulit untuk diinterpretasikan. Dampak negatif lain dari pengungkapan yang meluas adalah pada kompetisi yang dinamis dalam pasar produk. Tersebarnya informasi penting (*proprietary information*) dalam hal strategi dan rencana perusahaan dapat merugikan posisi kompetitif perusahaan sendiri. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan lebih mengutamakan pengungkapan wajib sesuai dengan peraturan Bapepam, karena dalam pengungkapan wajib ini investor dapat menginterpretasikan angka-angka dalam Laporan Keuangan dengan benar dan relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai Laporan Keuangan lain dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah data yang terbatas pada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam rating *Corporate Governance Perception Index*. Karena tidak semua perusahaan yang terdaftar di BEJ bersedia disurvei oleh IICG. Selain itu ada beberapa hal lain yang turut membatasi hasil pengujian dalam penelitian ini, yaitu terbatasnya publikasi rating *Corporate Governance Perception Index* yang dikeluarkan oleh IICG. Oleh karena itu peneliti menyarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian ini dengan data sampel yang lebih besar dan mengkaji pengaruhnya terhadap kebijakan perusahaan dalam mengungkap informasi dalam laporan tahunan, baik pengungkapan wajib, sukarela maupun agregat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Korelasi Sederhana

- a. Analisis ini menunjukkan adanya hubungan antara implementasi *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi baik wajib maupun sukarela. Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan *Corporate Governance* akan memberikan lebih banyak informasi dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan, semakin baik pelaksanaan *Corporate Governance* oleh suatu perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkap. Demikian juga sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang memberikan pengungkapan yang tinggi dalam laporan tahunan akan menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi dalam *Corporate Governance* pada perusahaan tersebut semakin baik.
- b. Faktor regulasi juga sangat penting dalam mempengaruhi penerapan *Corporate Governance* terutama untuk memenuhi prinsip tanggungjawab yaitu tanggungjawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan. Dalam hal ini

tanggungjawab kepada Bapepam sebagai regulator. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat regulasi yang sangat tinggi (perbankan) akan cenderung untuk menerapkan *Corporate Governance* dengan lebih baik.

- c. Keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit sebagai implementasi *Corporate Governance* terutama prinsip keadilan dan akuntabilitas berhasil membuktikan adanya hubungan yang signifikan dengan indeks *Corporate Governance*. Tetapi tidak mampu membuktikan adanya hubungan yang positif dengan indeks pengungkapan baik wajib maupun sukarela.
- d. Ukuran perusahaan secara positif berhubungan dengan indeks *Corporate Governance* dan pengungkapan sukarela. Hal ini sesuai dengan asumsi dasarnya yaitu penerapan *Corporate Governance* memerlukan biaya yang besar, dengan demikian perusahaan yang besar akan lebih mampu menerapkan *Corporate Governance* dengan lebih baik. Sedangkan ukuran perusahaan tidak terbukti berhubungan secara positif dengan indeks wajib.
- e. Struktur kepemilikan non manajer dan kepemilikan publik tidak berhasil memberikan bukti adanya korelasi dengan indeks *Corporate Governance* dan indeks pengungkapan baik wajib maupun sukarela.

2. Analisis Regresi menggunakan Two Stage Least Square

Penelitian ini terbukti menunjukkan adanya hubungan yang simultan antara indeks *Corporate Governance* dengan indeks pengungkapan wajib maupun sukarela.

a. Indeks pengungkapan wajib

Hasil pengujian terhadap persamaan (1) menunjukkan bahwa indeks pengungkapan wajib mempengaruhi indeks *Corporate Governance*. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib yang diberikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan tahunan, semakin tinggi pula tingkat implementasi *Corporate Governance* oleh perusahaan demikian juga sebaliknya. Tetapi variabel regulasi dan ukuran perusahaan tidak terbukti dapat mempengaruhi indeks *Corporate Governance*. Sedangkan hasil pengujian terhadap persamaan (2) menyatakan Indeks *Corporate Governance* mempengaruhi indeks pengungkapan wajib. Tetapi variabel struktur kepemilikan publik, keberadaan dewan komisaris independen, keberadaan komite audit dan ukuran perusahaan tidak terbukti dapat mempengaruhi indeks pengungkapan wajib.

b. Indeks pengungkapan sukarela

Hasil pengujian terhadap persamaan (1) menunjukkan bahwa indeks pengungkapan sukarela, regulasi dan ukuran perusahaan tidak terbukti dapat mempengaruhi indeks *Corporate Governance*. Sedangkan hasil pengujian terhadap persamaan (2) menyatakan Indeks *Corporate*

Governance mempengaruhi indeks pengungkapan sukarela. Tetapi variabel struktur kepemilikan publik, keberadaan dewan komisaris independen, keberadaan komite audit dan ukuran perusahaan tidak terbukti dapat mempengaruhi indeks pengungkapan sukarela.

5.2 Saran dan Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Laporan keuangan merupakan informasi yang bermanfaat sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh para *stakeholders* tetapi informasi yang lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan adalah bila *Corporate Governance* benar-benar diimplementasikan oleh setiap perusahaan, sebab semakin tinggi indeks implementasi *Corporate Governance*, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah data yang terbatas pada perusahaan-perusahaan yang masuk dalam rating *Corporate Governance Perception Index*. Karena tidak semua perusahaan yang terdaftar di BEJ bersedia disurvei oleh IICG. Selain itu ada beberapa hal lain yang mungkin ikut membatasi hasil pengujian dalam penelitian ini, yaitu terbatasnya publikasi rating *Corporate Governance Perception Index* yang dikeluarkan

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Anis, Tugas Komite Audit dalam *Good Corporate Governance*, dalam buku *The Essence of Good Corporate Governance*, FCGI dan YPPMI Institute, 2002.
- Belkhoui, A. R., (terj.), *Teori Akuntansi*, Jilid 1, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 1998.
- Hendriksen, E.S., dan M.F, Van Breda, (terj), *Teori Akunting*, Buku Satu, Edisi Kelima, Interaksara, Jakarta.
- Herwidayatmo, Implementasi *Good Corporate Governance* untuk perusahaan publik Indonesia, *Usahawan*, Oktober No. 10 th XXIX : 25-32, Jakarta, 2000.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Khomsiyah, *Hubungan Corporate Governance dan pengungkapan informasi : , pengujian secara simultan*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 2003.
- Na'im, Ainun, dan Fuad Rakhman, *Analisis Hubungan antara kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dengan struktur modal dan tipe kepemilikan perusahaan*, *Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 1, 70-82, Yogyakarta, 2000.
- Munawir, S., *Auditing Modern*, Edisi pertama, Yogyakarta, BPFE, 1995.
- Sabeni, Arifin, *An Empirical Analysis of The Relation between The Board of Director's Composition and The Level of Voluntary Disclosure*, Makalah Simposium Nasional Akuntansi VI, Semarang, 2002.
- Subiyantoro, Edy, *Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Karakteristik Perusahaan Publik di Indonesia*, Thesis, UGM, Yogyakarta, 1997.
- Suprayitno, G., Khomsiyah G.I., Sedarnawati Yasni, Dadi Krismantoro, Lola Rita, dan Rika Gelar Rahayu, *Good Corporate Governance: Learning Toward a New Stage*. The Indonesian Institute for Corporate Governance, Jakarta, , 2004.
- The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG), *Seputar Komite Audit*, Jakarta, 2000.

Tjager, I Nyoman, F. Antonius Alijoiyo, Humphery R., Djemat, dan Bambang Soembodo, *Corporate Governance: Tantangan dan kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2003.

www.bankniaga.com

www.fcgi.or.id

www.iicg.org

LAMPIRAN 1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ICG	42	48.94	90.46	72.1624	11.4280
IW	42	.52	.99	.9160	8.323E-02
IS	42	.23	.93	.7131	.1506
REG	42	.00	1.00	.2381	.4311
KNM	42	.060	99.120	66.60667	21.28275
PUBLIK	42	.880	81.820	29.67405	16.70586
DK	42	.000	1.000	.78571	.41530
KA	42	.000	1.000	.80952	.39744
SIZE	42	399171310087.00	129053150000000.00	14074812932976.5000	28670863469334.1800
Valid N (listwise)	42				

LAMPIRAN 2

Correlations

	ICG	IW	IS	REG	KNM	PUBLIK	DK	KA	SIZE
ICG	1.000	.450**	.410**	.406**	.058	-.136	.673**	.665**	.420**
		.003	.007	.008	.717	.391	.000	.000	.006
		42	42	42	42	42	42	42	42
IW	.450**	1.000	.759**	.333*	.046	-.070	.144	.175	.292
	.003		.000	.031	.772	.660	.364	.267	.061
	42	42	42	42	42	42	42	42	42
IS	.410**	.759**	1.000	.541**	-.047	-.107	.112	.043	.392*
	.007	.000		.000	.770	.502	.479	.788	.010
	42	42	42	42	42	42	42	42	42
REG	.406**	.333*	.541**	1.000	.016	-.353*	.156	.129	.621**
	.008	.031	.000		.920	.022	.325	.416	.000
	42	42	42	42	42	42	42	42	42
KNM	.058	.046	-.047	.016	1.000	-.784**	.122	.112	.071
	.717	.772	.770	.920		.000	.440	.482	.655
	42	42	42	42	42	42	42	42	42
PUBLIK	-.136	-.070	-.107	-.353*	-.784**	1.000	-.038	-.005	-.236
	.391	.660	.502	.022	.000		.810	.973	.133
	42	42	42	42	42	42	42	42	42
DK	.673**	.144	.112	.156	.122	-.038	1.000	.929**	.162
	.000	.364	.479	.325	.440	.810		.000	.305
	42	42	42	42	42	42	42	42	42
KA	.665**	.175	.043	.129	.112	-.005	.929**	1.000	.147
	.000	.267	.788	.416	.482	.973	.000		.354
	42	42	42	42	42	42	42	42	42
SIZE	.420**	.292	.392*	.621**	.071	-.236	.162	.147	1.000
	.006	.061	.010	.000	.655	.133	.305	.354	
	42	42	42	42	42	42	42	42	42

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 3
Two-stage Least Squares CGPI - Indeks Wajib

MODEL: MOD_5.

Equation number: 1

Dependent variable.. ICG

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .34608
 R Square .11977
 Adjusted R Square .09776
 Standard Error 14.19125

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	1096.1083	1096.1083
Residuals	40	8055.6677	201.3917

F = 5.44267 Signif F = .0248

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
IW	177.173465	75.943869	1.290347	2.333	.0248
(Constant)	-90.120076	69.595426		-1.295	.2028

Correlation Matrix of Parameter Estimates

IW

IW 1.0000000

The following new variables are being created:

Name	Label
FIT_1	Fit for ICG from 2SLS, MOD_5 Equation 1
ERR_1	Error for ICG from 2SLS, MOD_5 Equation 1

LAMPIRAN 4

Regression Uji Hausman : CGPI - Indeks Wajib

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Fit for CGPI from 2SLS, MOD_5 Equation 1 ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CGPI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.450 ^a	.202	.182	10.3340

a. Predictors: (Constant), Fit for CGPI from 2SLS, MOD_5 Equation 1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1082.840	1	1082.840	10.140	.003 ^a
	Residual	4271.683	40	106.792		
	Total	5354.523	41			

a. Predictors: (Constant), Fit for CGPI from 2SLS, MOD_5 Equation 1

b. Dependent Variable: CGPI

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	47.013	8.057		5.835	.000
	Fit for CGPI from 2SLS, MOD_5 Equation 1	.349	.109	.450	3.184	.003

a. Dependent Variable: CGPI

LAMPIRAN 5
Two-stage Least Squares Indeks Wajib - CGPI

MODEL: MOD_1.

Equation number: 1

Dependent variable.. IW

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .29756
 R Square .08854
 Adjusted R Square .06575
 Standard Error .07561

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	.02221547	.02221547
Residuals	40	.22868988	.00571725

F = 3.88569 Signif F = .0556

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
ICG	.002647	.001343	.363435	1.971	.0556
(Constant)	.724947	.097597		7.428	.0000

Correlation Matrix of Parameter Estimates

ICG

ICG 1.0000000

The following new variables are being created:

Name	Label
FIT_1	Fit for IW from 2SLS, MOD_1 Equation 1
ERR_1	Error for IW from 2SLS, MOD_1 Equation 1

LAMPIRAN 6

Regression Housman Indeks Wajib - CGPI

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Fit for IW from 2SLS, MOD_1 Equation 1 ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: IW

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.450 ^a	.202	.182	7.526E-02

a. Predictors: (Constant), Fit for IW from 2SLS, MOD_1 Equation 1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.744E-02	1	5.744E-02	10.140	.003 ^a
	Residual	.227	40	5.664E-03		
	Total	.284	41			

a. Predictors: (Constant), Fit for IW from 2SLS, MOD_1 Equation 1

b. Dependent Variable: IW

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.217	.356		-.611	.545
	Fit for IW from 2SLS, MOD_1 Equation 1	1.237	.389	.450	3.184	.003

a. Dependent Variable: IW

LAMPIRAN 7

Regression CGPI - Indek Wajib

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SIZE ^a , IW, REG ^a		Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: CGPI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.554 ^a	.307	.253	9.8795

- a. Predictors: (Constant), SIZE, IW, REG

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1645.568	3	548.523	5.620	.003 ^a
	Residual	3708.955	38	97.604		
	Total	5354.523	41			

- a. Predictors: (Constant), SIZE, IW, REG
 b. Dependent Variable: CGPI

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.177	17.882		1.576	.123
	IW	45.566	19.795	.332	2.302	.027
	REG	4.103	4.662	.155	.880	.384
	SIZE	9.041E-14	.000	.227	1.308	.199

- a. Dependent Variable: CGPI

LAMPIRAN 8 Regression Indeks Wajib

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SIZE, KNM, KA, REG, CGPI, ^a PUBLIK, DK		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: IW

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.543 ^a	.295	.149	7.677E-02

a. Predictors: (Constant), SIZE, KNM, KA, REG, CGPI, PUBLIK, DK

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.365E-02	7	1.195E-02	2.028	.080 ^a
	Residual	.200	34	5.893E-03		
	Total	.284	41			

a. Predictors: (Constant), SIZE, KNM, KA, REG, CGPI, PUBLIK, DK

b. Dependent Variable: IW

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.5266	.151		3.489	.001
	CGPI	.0042	.002	.575	2.549	.015
	REG	.0499	.042	.258	1.195	.240
	KNM	.0011	.001	.290	1.066	.294
	PUBLIK	.0015	.001	.310	1.076	.290
	DK	-.0802	.080	-.400	-1.007	.321
	KA	.0213	.084	.102	.254	.801
	SIZE	-2,1079E-17	.000	-.007	-.038	.970

a. Dependent Variable: IW

LAMPIRAN 9
Two-stage Least Squares CGPI - Indeks Sukarela

MODEL: MOD_6.

Equation number: 1

Dependent variable.. CGPI

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .39992
 R Square .15993
 Adjusted R Square .13893
 Standard Error 11.42906

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	994.7383	994.73829
Residuals	40	5224.9383	130.62346

F = 7.61531 Signif F = .0087

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
IS	59.960169	21.727963	.790339	2.760	.0087
(Constant)	29.405070	15.594148		1.886	.0666

Correlation Matrix of Parameter Estimates

IS

IS 1.0000000

The following new variables are being created:

Name	Label
FIT_2	Fit for ICG from 2SLS, MOD_6 Equation 1
ERR_2	Error for ICG from 2SLS, MOD_6 Equation 1

LAMPIRAN 10

Regression Hausman : CGPI - Indeks Sukarela

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Fit for CGPI from 2SLS, MOD_6 Equation 1 ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: CGPI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.410 ^a	.168	.148	10.5503

a. Predictors: (Constant), Fit for CGPI from 2SLS, MOD_6 Equation 1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	902.204	1	902.204	8.105	.007 ^a
	Residual	4452.319	40	111.308		
	Total	5354.523	41			

a. Predictors: (Constant), Fit for CGPI from 2SLS, MOD_6 Equation 1

b. Dependent Variable: CGPI

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.683	13.265		2.615	.013
	Fit for CGPI from 2SLS, MOD_6 Equation 1	.519	.182	.410	2.847	.007

a. Dependent Variable: CGPI

LAMPIRAN 11
Two-stage Least Squares Indeks Sukarela - CGPI

MODEL: MOD_2.

Equation number: 1

Dependent variable.. IS

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R .30841
 R Square .09512
 Adjusted R Square .07249
 Standard Error .13912

Analysis of Variance:

	DF	Sum of Squares	Mean Square
Regression	1	.08137855	.08137855
Residuals	40	.77418405	.01935460

F = 4.20461 Signif F = .0469

----- Variables in the Equation -----

Variable	B	SE B	Beta	T	Sig T
CGPI	.005066	.002471	.384337	2.051	.0469
(Constant)	.347523	.179571		1.935	.0600

Correlation Matrix of Parameter Estimates

CGPI

CGPI 1.0000000

The following new variables are being created:

Name	Label
FIT_2	Fit for IS from 2SLS, MOD_2 Equation 1
ERR_2	Error for IS from 2SLS, MOD_2 Equation 1

LAMPIRAN 12

Regression Housman Indeks Sukarela - CGPI

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Fit for IS from 2SLS, MOD_2 Equation 1 ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: IS

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.450 ^a	.202	.182	7.526E-02

a. Predictors: (Constant), Fit for IS from 2SLS, MOD_2 Equation 1

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.744E-02	1	5.744E-02	10.140	.003 ^a
	Residual	.227	40	5.664E-03		
	Total	.284	41			

a. Predictors: (Constant), Fit for IS from 2SLS, MOD_2 Equation 1

b. Dependent Variable: IS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.455	.145		3.132	.003
	Fit for IS from 2SLS, MOD_2 Equation 1	.646	.203	.450	3.184	.003

a. Dependent Variable: IS

LAMPIRAN 13

Regression CGPI - Indeks Sukarela

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SIZE ^a , IS, REG ^a	.	Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: CGPI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.505 ^a	.255	.196	10.2490

- a. Predictors: (Constant), SIZE, IS, REG

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1362.913	3	454.304	4.325	.010 ^a
	Residual	3991.610	38	105.042		
	Total	5354.523	41			

- a. Predictors: (Constant), SIZE, IS, REG
 b. Dependent Variable: CGPI

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	56.520	8.641		6.541	.000
	IS	18.942	12.677	.250	1.494	.143
	REG	3.083	5.197	.116	.593	.557
	SIZE	9.952E-14	.000	.250	1.392	.172

- a. Dependent Variable: CGPI

LAMPIRAN 14
Regression Indeks Sukarela

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SIZE, KNM, KA, REG, CGPI, PUBLIK, DK ^a		Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: IS

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.642 ^a	.413	.292	.1268

- a. Predictors: (Constant), SIZE, KNM, KA, REG, CGPI, PUBLIK, DK

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.384	7	5.485E-02	3.413	.007 ^a
	Residual	.546	34	1.607E-02		
	Total	.930	41			

- a. Predictors: (Constant), SIZE, KNM, KA, REG, CGPI, PUBLIK, DK
 b. Dependent Variable: IS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.2223	.249		.892	.379
	CGPI	.0059	.003	.448	2.179	.036
	REG	.1654	.069	.473	2.398	.022
	KNM	.0010	.002	.135	.545	.589
	PUBLIK	.0021	.002	.234	.889	.380
	DK	.0956	.132	.264	.727	.472
	KA	-.2179	.138	-.575	-1.577	.124
	SIZE	-1.397E-17	.000	-.003	-.015	.988

- a. Dependent Variable: IS